

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, stunting, atau kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek di bandingkan usianya adalah masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Ciri-ciri kondisi kesehatan ini termasuk panjang badan menurut usia (PB/U) yang tidak sesuai usia atau tinggi badan menurut usia (TB/U) yang tidak sesuai usia, dengan Standar Deviasi (SD) kurang dari -2 SD^1 . Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangatlah penting, karena tujuan nomor 2—membuat Indonesia bebas dari kelaparan dan malnutrisi lainnya pada tahun 2030—termasuk target untuk mengatasi masalah stunting².

Seseorang yang mengalami stunting sejak dini dapat memberikan dampak yang buruk ke depannya sebagai akibat dari kekurangan nutrisi yang berkepanjangan. Oleh karena itu isu ini menjadi sangat penting sehingga Pemerintah Republik Indonesia menjadikan stunting sebagai isu prioritas dalam pembangunan sektor kesehatan pada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024³.

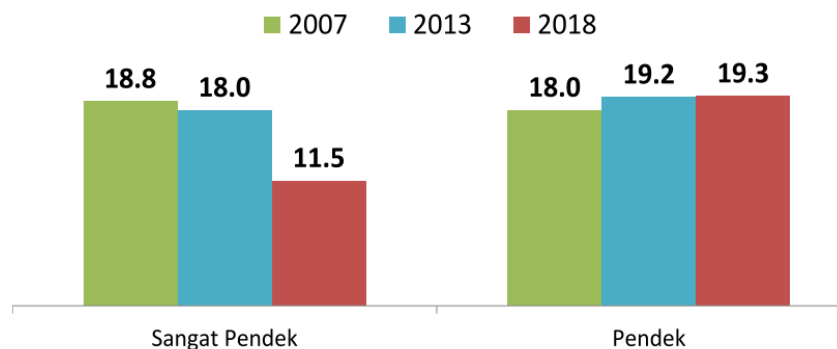
Pemerintah telah menetapkan tujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sejak ditingkatkan pada tahun 2018, peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum dan acuan untuk Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting⁴.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020–2024 telah disusun oleh Kementerian Kesehatan selain Keputusan Presiden tersebut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Tujuan utama rencana ini adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi stunting dan wasting pada balita, serta meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyusun Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI) dalam rangka untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut. Para pemangku kepentingan dalam inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, termasuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan lainnya, menggunakan rencana aksi ini sebagai peta jalan untuk koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN menginisiasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk mendorong peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait⁵.

Kekurangan gizi dalam jangka panjang (kronis) dapat menjadi penyebab terhambatnya tumbuh kembang balita, terutama pada masa kritis 1000 Hari

Pertama Kehidupan (1000 HPK). Kekurangan nutrisi ini diperkirakan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga meningkatkan kemungkinan timbulnya penyakit kronis di kemudian hari⁶.

Banyak hal yang mungkin berdampak pada stunting. Rendahnya asupan gizi dan status kesehatan merupakan variabel yang berpengaruh langsung. Sedangkan sistem kesehatan, sistem pangan, urbanisasi, kesenjangan pendapatan dan ekonomi, dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung⁷. Berdasarkan fakta tersebut, perlu dilakukan intervensi yang terencana serta terorganisir dari berbagai pihak, baik dari tenaga kesehatan, maupun dengan kolaborasi lintas sektor.



Gambar 1.1 Proporsi Status Gizi Sangat Pendek dan Pendek pada Balita 2007-2018, sumber : Riset Kesehatan Dasar 2018

Menurut data hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 di atas, prevalensi stunting (pendek) di Indonesia berada di angka 19,3%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang berada di angka 19,2% dan tahun 2007 yang berada di angka 18%. Jika dibandingkan dengan prevalensi stunting secara

menyeluruh, yaitu termasuk *stunted* dan *severe stunted* yang sebesar 30,8%, maka hasilnya lebih tinggi dari prevalensi stunting saja⁸.

Kemudian berdasarkan data dari Kemenkes Hasil Survei Status Gizi Indonesia 2022, prevalensi balita stunting (TB/U) di Indonesia sebesar 21,6%. Fakta tersebut menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 24,4% pada tahun 2021. Sementara itu, prevalensi balita stunting berdasarkan provinsi, Jawa Barat berada di angka 20,2%⁹.

Dalam menanggapi isu stunting tersebut BKKBN dengan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) merupakan salah satu intervensi untuk mengatasi stunting. Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) memiliki target program yaitu kelompok sasaran langsung. Adapun yang terlibat dalam program ini yaitu pemangku kepentingan yang terorganisir dan terukur yang bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting⁵. Program BAAS merupakan program nasional yang di edarkan oleh BKKBN melalui Surat Permohonan Nomor 560.A/HL.01.01/G2/2022 tentang Menggelorakan dan Menghimbau Mitra untuk Menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Menurut Perwakilan BKKBN Jawa Barat, dalam pelaksanaan Program BAAS di Jawa Barat, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang merupakan wilayah di mana Program BAAS tersebut pertama bergulir¹⁰.

Menurut data dari Hasil Survei Status Gizi Indonesia 2022, di antara dua kabupaten tersebut, Kabupaten Subang memiliki angka prevalensi stunting yang lebih tinggi jika di dibandingkan dengan Kabupaten Karawang, yaitu sebesar 15.7%

di Kabupaten Subang, dan 14% di Kabupaten Karawang⁹. Pelaksanaan Program BAAS di Kabupaten Subang dilandasi oleh Surat Perintah Nomor KS.01/1362-DP2KBP3A yang dikeluarkan oleh Bupati Subang pada tanggal 16 Agustus 2022. Surat tersebut berisi himbauan kepada pemangku kepentingan untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting Kabupaten Subang. Yang dimaksud pemangku kepentingan dalam surat tersebut ialah lembaga serta instansi pemerintah dan juga seluruh puskesmas yang terdapat di Kabupaten Subang dengan sasaran yaitu balita stunting yang sudah ditentukan¹¹. Dalam pelaksanaan program tersebut, salah satu intervensinya adalah berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama 3 bulan terhadap balita stunting yang diberikan langsung oleh Bapak Asuh (lembaga, instansi pemerintah, dan puskesmas).

Program tersebut tergolong dalam program pemberdayaan masyarakat yang di rancang dan diluncurkan oleh BKKBN dan melibatkan komponen pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu target stunting 14%. Hal tersebut sejalan dengan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan mengenai pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Selanjutnya sejalan dengan Q.S. Surat An-Nisaa ayat 9 yang berbunyi, “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. Salah satu aspek keberhasilan program BAAS yang belum banyak mendapat penelitian adalah bagaimana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapat berpengaruh pada

peningkatan status gizi balita stunting. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Implementasi PMT pada Program BAAS di Kabupaten Subang Tahun 2022, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan. Pada penelitian ini, analisis dilakukan secara terfokus akan melihat komponen pemerintah, dalam hal ini BKKBN saja, yaitu pemberian PMT yang dilakukan oleh perwakilan BKKBN di Kabupaten Subang.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan Surat Perintah Bupati Kabupaten Subang Nomor KS.01/1362-DP2KBP3A yang mengarahkan agar program BAAS dilaksanakan di masing-masing kecamatan, dengan tujuan untuk balita stunting. Oleh karena itu, penulis penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak program BAAS di Kabupaten Subang dengan dilaksanakannya PMT pada tahun 2022.

Pertanyaan kajiannya adalah: apakah pemberian PMT pada Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) berpengaruh terhadap perbaikan status antropometri (BB/U dan TB/U) pada balita stunting di Kabupaten Subang pada tahun 2022? Hal ini didasarkan pada uraian masalah penelitian yang dibahas sebelumnya.

1.3 Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Untuk mengetahui dampak pelaksanaan PMT tahun 2022 pada Program BAAS di Kabupaten Subang.

2) Tujuan Khusus

Mengetahui apakah terdapat peningkatan status gizi balita stunting dari sebelum dan setelah implementasi PMT pada program BAAS di Kabupaten Subang pada tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pencegahan dan pengobatan stunting pada anak secara langsung dan tidak langsung. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1.4.1 Aspek Teoritis

Memberikan informasi dan rekomendasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan mengenai penyuntingan, khususnya terkait dengan penerapan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dalam upaya menurunkan angka stunting. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis pengaruh penerapan PMT pada Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Stunting di Kabupaten Subang pada tahun 2022. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian di masa depan mengenai topik penanganan stunting.

1.4.2 Aspek Praktis

Mampu menginformasikan kepada masyarakat mengenai stunting, penanganan stunting, dan juga pencegahannya sehingga dapat turut serta membantu mewujudkan target RPJMN 2024 yaitu angka stunting di Indonesia sebesar 14%, serta sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).